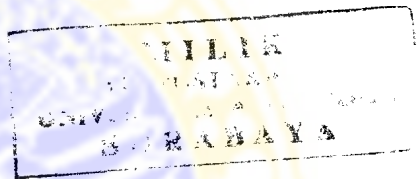


KK
Per 14/01
Man
P

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BORG DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM



Menyetujui,

Dosen Pembimbing

LISMAN ISKANDAR, S.H., MS
NIP. 130675526

Penulis

FERRI MAULUDI
NIM. 039514164

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

BAB IV

PENUTUP

1. *Kesimpulan*

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang timbul, yaitu ;

- a. Perjanjian penanggungan apabila dilihat dari sudut pandang hukum jaminan di Indonesia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang antara debitor dengan kreditor. Perjanjian penanggungan adalah perjanjian antara borg dengan kreditor dimana dalam perjanjian tersebut borg secara suka rela dan tanpa syarat mengikatkan diri pada perjanjian pokok untuk menjamin atau menanggung pemenuhan prestasi atau kewajiban debitor kepada kreditor.
- b. Hukum memberikan perlindungan kepada borg untuk melaksanakan hak yang dimiliki oleh borg sendiri yaitu hak *regres*, dimana hak tersebut memberikan kewenangan bagi borg untuk menuntut kembali kepada debitor utama setelah borg memenuhi

kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh debitor utama kepada kreditor. Jadi debitor utama, karena sebenarnya dialah yang mempunyai hutang, tetap menjadi pihak yang harus membayar.

2. Saran

- a. Perjanjian penanggungan merupakan alternatif yang baik bagi para pelaku usaha, dimana dengan adanya perjanjian penanggungan, maka para pihak akan memperoleh keuntungan. Bagi pihak kreditor, akan menjamin kembali harta yang dipinjamkan kepada debitor, bagi debitor sendiri apabila ia mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, akan dibantu oleh borg untuk melakukan kewajiban tersebut, sedangkan bagi borg sendiri, tidak perlu takut harta yang telah ia keluarkan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor akan hilang begitu saja, karena hukum telah menjamin bahwa hartanya yang telah ia keluarkan tersebut akan dikembalikan oleh debitor utama.
- b. Dalam melakukan perjanjian penanggungan, seyogianya diketahui oleh para pihak yaitu selain kreditor dan borg sendiri, dan

terutama debitor utama, walaupun diperbolehkan melakukan perjanjian penanggungan tanpa sepengetahuan debitor utama, akan tetapi hal ini dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan baru yang akan merugikan khususnya pihak borg karena dirinya tidak dapat menuntut haknya yang telah dijamin oleh hukum yaitu untuk melaksanakan hak regres.

